

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹ Hal ini diatur juga dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²

Manusia disebut sebagai anak dengan pengukuran atau batasan usia. Kondisi ini tercermin dari perbedaan batasan usia di setiap negara. Setiap negara diberikan peluang untuk menentukan berapa usia manusia yang

¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8-9

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,

dikategorikan sebagai anak. Di Amerika Serikat menentukan batas umur antara 8-18 tahun dikatakan anak, Australia di menentukan batas umur 8-16 tahun dikatakan anak, Inggris menentukan antara 12-16 tahun disebut sebagai anak, Srilangka anak 8-16 tahun, Jepang dan Korea 14-20 tahun, Taiwan menentukan batasan anak 14-18 tahun, Kamboja batas usia anak 15-18 tahun, dan negara-negara ASEAN untuk Malaysia 7-18 tahun, Singapura 7-16 tahun.³ Sedangkan di negara Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan⁴

Pada era sekarang ini dikarenakan begitu lemahnya posisi anak dilingkungan baik itu lemah fisikdan mental, banyak pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjadikan korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi khususnya komunikasi yang sering disalah gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi tindak

³ Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delinquenci: Pemahaman dan Penaggulangannya*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1997), hlm. 8

⁴Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak.⁵ Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya misalnya orangtua, guru dan orang terdekat lainnya. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja, di rumah, tempat bermain, atau bahkan di sekolah. Banyak kasus terjadi kekerasan dilakukan oleh orang-orang terdekat, yang semestinya memberikan perlindungan dan kasih sayang.⁶

Hal tersebut dapat dilihat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus,” kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti kepada Harian Terbit, Minggu (14/6/2015). Dia memaparkan, 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015. Anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan cybercrime 1032 kasus.⁷ Komisi

⁵ Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Penerbit Yayasan Obor. Jakarta. 2006. hlm.11

⁶ M. Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Law Protection On Children As A Crime Victim*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 97-110. ISSN: 0854-5499

⁷ KPAI: *Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/> , 14 Juni 2015

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat ini mencatat ada 1000 kasus kekerasan pada anak dalam kurun waktu selama tahun 2016. Jumlahnya bisa meningkat karena ada yang laporan di Polri dan jajarannya.⁸ Jumlah ini juga hampir sama dengan negara tetangga yaitu Malaysia, yaitu jumlah kasus yang tercatat di tahun 2010 hanya 3.257 kasus namun meningkat menjadi 4.453 kasus pada tahun 2015. Kemudian meningkat sebanyak 4.652 kasus dari tahun 2015 sampai 2016 dan seperti kebanyakan negara lainnya, kasus penganiayaan anak di Malaysia diyakini lebih banyak daripada jumlah namun sebagian tersembunyi di balik layar.⁹

Antara Indonesia dengan Malaysia memiliki latar belakang yang sama berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, namun memiliki pengaturan yang berbeda terkait tindak kekerasan terhadap anak, di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law untuk mencegah dan mengatasi segala permasalahan yang dihadapi oleh anak, sudah ada peraturan hukum dan sudah disahkannya peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak yaitu UU No. 35 Tahun 2014, dimana Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sedangkan di Malaysia pengaturan mengenai kekerasan terhadap

⁸ KPAI: *Selama 2016, KPAI Catat 1000 Kasus Kekerasan pada Anak* <http://www.kpai.go.id/berita/8194/> 7 Desember 2016

⁹ *Kes dera kanak-kanak wajib ditangani* <http://www.utusan.com.my/rencana/forum/kes-dera-kanak-kanak-wajib-ditangani-1.476134> 01 Mei 2017

anak diatur dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Pemilihan negara Malaysia ini didasarkan pada bahwa *pertama*, dari aspek geografis bahwa negara Malaysia berbatasan dengan Indonesia, sehingga dikatakan sebagai negara tetangga; *kedua*, aspek hukum, (a) asas hukum pidana yang berlaku untuk penjatuhan pidana sama dengan Indonesia bahwa seseorang dihukum atas kekuatan undang-undang dan seseorang tidak boleh dituntut dua kali dalam perkara yang sama; (b) sistem hukumnya bahwa Malaysia menganut sistem Anglo Saxon dan Indonesia sistem Civil Law, karena kedua negara memiliki sejarah berbeda. Meskipun demikian di era globalisasi pemisahan yang demikian sekarang tidak begitu ekstrim karena adanya arus komunikasi cukup pesat yang menjadikan dunia tanpa batas, sehingga hukum pun bergerak.¹⁰ *Ketiga*, bahwa Indonesia dan Malaysia adalah negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan tujuan penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial bagi anak, perlindungan terhadap anak dari situasi membahayakan.

Dalam melihat fenomena kekerasan terhadap anak yang terus meningkat dan perlu adanya langkah yang lebih tepat dikarenakan globalisasi telah berlangsung dengan sangat pesat, baik dibidang ekonomi dan perdagangan, maupun bidang kebudayaan dan hukum .¹¹ Penulis Kajian perbandingan hukum dilakukan secara spesifik untuk menemukan data-data hukum yang berlainan yang terefleksi dengan teridentifikasinya faktor-faktor

¹⁰ Kuswardani, Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 47, No. 4, 2017, hal: 425

¹¹ A. Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal.

persamaan dan perbedaan dari data tersebut, atau lebih dari itu bertujuan secara luas untuk memahami fenomena hukum yang lebih besar tidak sekedar persamaan dan perbedaan.¹² Maka penulis akan melakukan penelitian guna penyusunan tugas mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana yang berjudul “KEKERASAN TERHADAP ANAK: PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA MALAYSIA”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana formulasi perbuatan kekerasan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia?
2. Bagaimana ketentuan pidana kekerasan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Untuk mengetahui formulasi perbuatan kekerasan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia
2. Untuk mengetahui ketentuan pidana kekerasan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia dan Malaysia

Adapun untuk manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara substansial bagi pengembangan hukum pidana dan sebagai data ilmiah

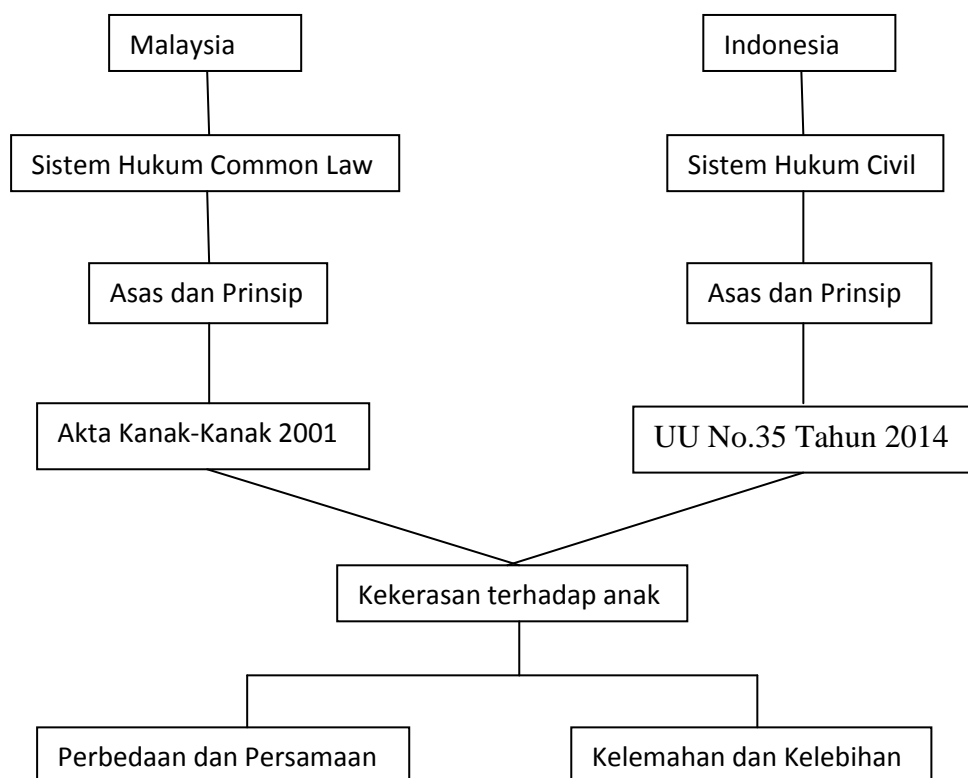
¹² Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: perbandingan teori dan metode*, Gadjadara University Press, Yogyakarta, 2016, hal. x

bagi pengembangan penulisan dalam ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Dan penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi tambahan dalam pembelajaran bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi akademisi, pemerintah, dan para penegak hukum dalam melakukan perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan.

D. Kerangka Pemikiran



Dalam kerangka pemikiran di atas menjelaskan mengenai langkah dan sistematika berfikir penulis dalam melakukan penelitian ini. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang menganut sistem hukum yang berbeda, Indonesia menganut sistem hukum Civil Law dan Malaysia

menganut sistem hukum Common Law, untuk itu penulis menguraikan terlebih dahulu mengenai kedua sistem hukum tersebut. Selanjutnya sebuah Undang-Undang dikeluarkan berdasarkan dasar berupa asas dan prinsip, yang dimana konsep pengaturan mengenai Kekerasan terhadap anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan Akta Kanak-Kanak 2001 adalah berbeda. Dari perbedaan tersebut akan diidentifikasi mengenai perbedaan dan persamaan serta kelemahan dan kelebihanannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada norma hukum positif seperti norma perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴ Penelitian ini merupakan:

- a. Penelitian menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hal: 13

¹⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hal: 118

untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

b. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu

1) Secara vertikal, yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama.

2) Secara horizontal, yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang sama derajat dan mengatur bidang yang sama.

c. Penelitian perbandingan hukum, dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.

Jaako Husa (Elgar Encyclopedia Of Comparative Law, 2006) membedakan antara “macro-comparative law” dan “micro comparative law”. Perbandingan hukum makro, lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar seperti masalah sistematika, penggolongan dan pengklasifikasian sistem hukum. Perbandingan hukum mikro, berkaitan dengan aturan-aturan, kasus-kasus dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus/aktual.¹⁵

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Jakarta, 2012, hal: 4

Apabila dilihat dari pendapat Jaako Husa maka penelitian ini masuk kedalam perbandingan hukum mikro yaitu perbandingan antara asas, prinsip, dan formulasi aturan mengenai tindak kekerasan/perbedaan serta kelemahan/kelebihan, sehingga dapat membentuk suatu upaya koreksi dalam melindungi anak sebagai korban tindak kekerasan.

3. Jenis data

a. Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Akta Kanak-kanak tahun 2001
- 5) Penal Code Act 574 tahun 2015
- 6) Akta 521 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisikan data yang mendukung dan memeberi penjelasan untuk data primer berupa buku, jurnal, artikel,

dan surat kabar yang berhubungan dengan tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia dan Malaysia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi dokumen/studi pustaka dari bahan-bahan pustaka.¹⁶ Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan studi dokumen adalah dengan melakukan analisa isi (content analysis). Content analysis adalah teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen suatu dokumen. Ada beberapa sumber untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

a. Bahan pustaka dalam bidang non hukum, adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber primer (primary sources), merupakan dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah atau fakta yang diketahui ataupun tentang ide. Contoh: buku, makalah, simposium, lokakarya, seminar, kongres, laporan teknik, artikel majalah, surat kabar, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sumber sekunder (secondary sources), merupakan dokumen yang berisi informasi tentang bahan pustaka sumber primer. Contoh: bahanbahan referensi (acuan atau rujukan)

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hal 12.

b. Bahan pustaka hukum dilihat dari kekuatan mengikatnya

- 1) Sumber primer, dalam hal ini sumber data sekunder berasal dari:
 - i. Norma Dasar;
 - ii. Peraturan Dasar
 - iii. Undang-undang
 - iv. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi
- 2) Sumber sekunder (secondary sources), merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Contoh: Rancangan Undang-undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi.
- 3) Sumber tersier (tertiary sources), merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Contoh: abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.¹⁷

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itulah, penulis menggunakan data bahan hukum primer sebagai data yang utama dalam menganalisis kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *ibid*, hal: 30

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 325-326.

5. Metode Analisis Data

Dalam hal ini dikarenakan pada hakekatnya pengolahan, analisa dan konstruksi data secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan dua cara yang saling melengkapi dalam menyusun data primer dan sekunder, sehingga pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.¹⁹

F. Sistematika Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab 1 pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab 2 tinjauan pustaka ini didalamnya mencakup landasan teoritis berupa asas dan prinsip dan berupa pembahasan formulasi ketentuan tindak kekerasan terhadap anak, serta tinjauan ratifikasi konvensi hak-hak anak.

3. BAB III HASIL DAN PENELITIAN

Dalam bab 3 pembahasan dan hasil penelitian ini terdiri dari beberapa pembahasan, yang *pertama*, penguraian konsep dasar berupa asas dan prinsip tindak kekerasan terhadap anak. *Kedua*, berupa pembahasan ketentuan dalam perundang-undangan berkaitan dengan formulasi

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hal 68-69

perbuatan tindak kekerasan terhadap anak. *Ketiga*, menganalisis perbedaan/persamaan dan kelebihan/kekurangan dari masing-masing aturan antara negara Indonesia dan Malaysia.

4. BAB IV PENUTUP

Dalam bab 4 penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran.